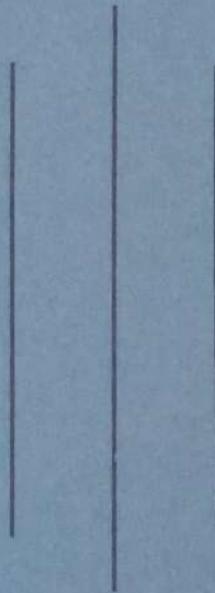




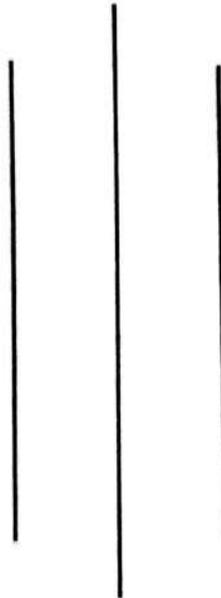
**PERATURAN KALURAHAN SELANG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SELANG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN SELANG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SELANG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH SELANG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SELANG
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Selang Nomor 03 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, dengan Keputusan Panewu Wonosari Nomor : 97/KPTS/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun

- 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dari Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5370 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dari Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 0960);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 Nomor 61);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Selang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Selang Tahun 2019 Nomor 03);
24. Peraturan Kalurahan Selang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

(RPJMKal) Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Selang Tahun 2022 Nomor 03).

25. Peraturan Kalurahan Selang Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Selang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Selang Tahun 2023 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELANG

dan

LURAH SELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.164.377.300,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp. 2.212.701.946,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (48.324.646,00) |
| 3. Pembiayaan Desa: | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 96.005.646,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 47.681.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 48.324.646,00 |
| SILPA Tahun Anggaran Berjalan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar

biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

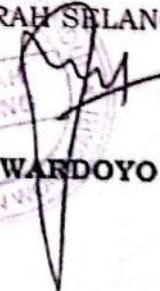
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

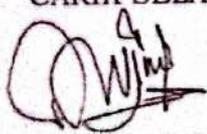
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Selang.

Ditetapkan di : Selang
pada tanggal : 29 Desember 2023

LURAH SELANG,

WARDOYO

Diundangkan di : Selang
pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK SELANG,

WINDARTI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SELANG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SELANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 67.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.075.977.300,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 21.400.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.164.377.300,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 783.352.836,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 576.932.265,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 785.616.845,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 66.800.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.212.701.946,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (48.324.646,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 96.005.646,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 96.005.646,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 47.681.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Des. | 47.681.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 48.324.646,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

SELANG, 29 Desember 2023

LURAH

 WARDOYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SELANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 67 000 000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2 075 977 300,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 21 400 000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.164.377.300,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | 1.176.601.481,00 | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 926.559.967,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 49 200 000,00 | ADD. PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 49 200 000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 623 960 000,00 | ADD. PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 623 960 000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40 705 056,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40 705 056,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 64 022 551,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 64 022 551,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 69 487 780,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 69 487 780,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6 680 000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6 680 000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 43 904 580,00 | ADD, PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 43 904 580,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 28 600 000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28 600 000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 102.880.950,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 98 258 400,00 | DDS, PAD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 98 258 400,00 | |
| 1.2.90 | | Pengadaan Peralatan Kerja | 1 890 000,00 | ADD, PAD |
| 1.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 200 000,00 | |
| 1.2.90 | 5.3. | Belanja Modal | 1 690 000,00 | |
| 1.2.95 | | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja | 2 732 550,00 | PAD, PBK |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.95 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.732.550,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 33.700.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 31.500.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.500.000,00 | |
| 1.3.02 | 5.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyusunan Monografi Desa | 2.200.000,00 | PAD |
| 1.3.90 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 107.870.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 9.000.000,00 | PAD |
| 1.4.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler) | 3.800.000,00 | PAD |
| 1.4.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) | 2.950.000,00 | PAD |
| 1.4.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.950.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 11.875.000,00 | PAD, PBH |
| 1.4.04 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.875.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 43.670.000,00 | DDS, PBH |
| 1.4.05 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.670.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.350.000,00 | PAD |
| 1.4.07 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.350.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 34.225.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.225.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3 | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 5.590.564,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 2.040.564,00 | ADD |
| 1.5.06 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.040.564,00 | |
| 1.5.94 | | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB | 3.550.000,00 | ADD |
| 1.5.94 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.550.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>765.732.545,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 33.100.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 13.100.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.100.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 20.000.000,00 | DDS |
| 2.1.06 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 390.000,00 | |
| 2.1.06 | 5.3 | Belanja Modal | 19.610.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 121.250.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindas Milk Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 36.100.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.100.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45.600.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.600.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 14.800.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.800.000,00 | |
| 2.2.91 | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 5.550.000,00 | DDS |
| 2.2.91 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.550.000,00 | |
| 2.2.94 | | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 19.200.000,00 | DDS |
| 2.2.94 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 579.242.545,00 | |
| 2.3.02 | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 135.975.545,00 | DDS |
| 2.3.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 539.700,00 | |
| 2.3.02 | 5.3 | Belanja Modal | 135.435.845,00 | |
| 2.3.06 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 25.000.000,00 | PBK |
| 2.3.06 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 192.344.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | |
| 2.3.12 | 5.3 | Belanja Modal | 191.644.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) | 126.248.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | |
| 2.3.14 | 5.3 | Belanja Modal | 125.548.000,00 | |
| 2.3.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 99.675.000,00 | DDS, PBK |
| 2.3.99 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.013.000,00 | |
| 2.3.99 | 5.3 | Belanja Modal | 98.662.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 32.140.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 32.140.000,00 | DDS |
| 2.4.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.140.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>187.973.920,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 12.973.920,00 | |
| 3.2.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 12.973.920,00 | PBH |
| 3.2.99 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.973.920,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 175.000.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 175.000.000,00 | PBP |
| 3.3.05 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.973.000,00 | |
| 3.3.05 | 5.3 | Belanja Modal | 173.027.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>15.594.000,00</u> | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|--------------------------------|-----|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.6 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 5.594.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 5.594.000,00 | PAD |
| 4.6.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.594.000,00 | |
| 4.7. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 10.000.000,00 | |
| 4.7.01 | | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 10.000.000,00 | DDS |
| 4.7.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 66.800.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 29.400.000,00 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 29.400.000,00 | DDS, DLL |
| 5.2.00 | 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 29.400.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 32.400.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 32.400.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 32.400.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 2.212.701.946,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | (48.324.646,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 96.005.646,00 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 47.681.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTC | | | 48.324.646,00 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 0,00 | |



BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN SELANG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Selang dan Bamuskal Selang dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Selang dan Bamuskal Selang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat / Sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui dan Mengesahkan:

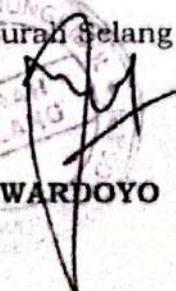
Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selang Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Selang Nomor 08 Tahun 2023 setelah mendapatkan Evaluasi Panewu Wonosari atas nama Bupati Gunungkidul.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Selang, 29 Desember 2023

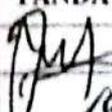
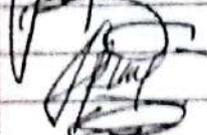
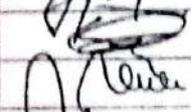
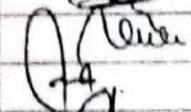
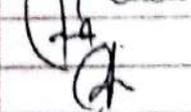
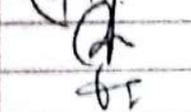
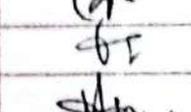
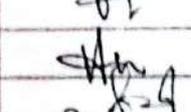
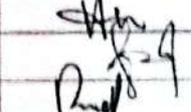
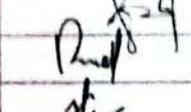
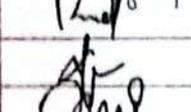
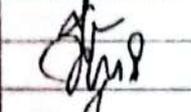
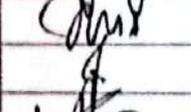
Ketua Bamuskal Selang

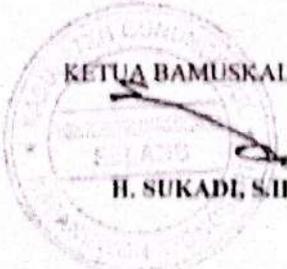
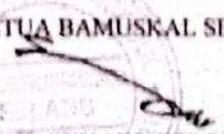
H. SUKADI, S.IP.MM

Lurah Selang

WARDOYO

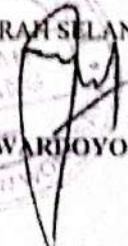
DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 29 Desember 2023
 Acara : Rapat Bersama Antara Pemerintah Kelurahan dan Bamuskal Kelurahan
 Selang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
 (APBKal) TA 2024
 Tempat : Balai Kelurahan Selang

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|----------------|------------|---|
| 1 | WARDJOYO | Lurah | Selang |  |
| 2 | Jufri | Ketua | Selang 3 |  |
| 3 | Kasi Man | Wk Ketua | Selang 2 |  |
| 4 | Purpani | Sh. Kordinator | R II |  |
| 5 | Melanyaso | Bendah | Selang 3 |  |
| 6 | Nusi Pagarudin | Kabid Perda | Selang 4 |  |
| 7 | Donang Iri H | Banmuskal | Makel. |  |
| 8 | Suryani | Banmuskal | Selang 4 |  |
| 9 | Paryanti | Banmuskal | Selang 5 |  |
| 10 | Purnama | Pangsupda | Selang 5 |  |
| 11 | Rizka Eshw | Uti uti | Rakhyal |  |
| 12 | Ulumani | Pacato | Kel 5 |  |
| 13 | Windani | Carik | Nagabani 3 |  |
| 14 | Herlan.p. | rt/R | Selang 3 |  |
| 15 | Mi honganto | pengabjo | walcal |  |
| 16 | Wahyu fitriyato | Komitmen | Rodong 1 |  |


 KETUA BAMUSKAL SELANG

 H. SUKADI, S.IP.MM

Selang, 29 Desember 2023

 LURAH SELANG

 WARDJOYO